



118 Desa Terapkan Non Tunai

■ Teken Kerja Sama Bank Kalbar

KUBU RAYA, TRIBUN - Sebanyak 118 desa di Kubu Raya telah menandatangani perjanjian kerja sama implementasi transaksi nontunai desa dengan Bank Kalbar di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/2). Kabupaten Kubu Raya memang merupakan kabupaten yang pertama kali mencetuskan transaksi non tunai di desa. Kini dengan penggunaan sistem non tunai ini, pihak desa merasa sangat terbantu.

Ide penerapan sistem nontunai ini berasal dari Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Desa yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Bahkan 28 desa di antaranya telah menerapkan sistem non tunai ini sejak tahun 2019 lalu," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

Pokja ini bertugas mendampingi setiap desa di Kubu Raya dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Pokja bersama dirinya kemudian melontarkan gagasan berbentuk tantangan kepada desa-desa untuk mengelola dana desa secara nontunai.

"Ternyata ada 28 desa yang menyatakan siap. Nah, kita buat regulasinya, peraturan bupatinya tentang sistem dan prosedur pengelolaan secara nontunai. Lalu kita lakukan pelatihan bersama Bank Kalbar sebagai pemegang aplikasi CMS dan selanjutnya langsung dipraktikkan di 28 desa tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kubu Raya menyatakan di era digital saat ini sistem transaksi nontunai sangat kontekstual. Walaupun sempat ada kendala di awal berkaitan dengan jaringan Internet. Namun kendala tersebut bisa diatasi dengan cara berpindah posisi operasional ke lokasi yang memiliki jaringan Internet yang baik.

"Ketika jaringan lemah maka bisa bergeser dulu ke tempat yang punya jaringan yang baik. Misalnya ke pusat kecamatan. Dan dengan menggunakan laptop eksekusi dapat dilakukan di tempat itu. Jadi tetap ada solusi," ungkapnya.

Selain itu, Muda mengata-

kan secara non tunai dilatari pemikiran bahwa dana desa dan alokasi dana desa adalah hak rakyat.

"Ini dananya masyarakat desa yang harus dikelola dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Muda menilai penerapan transaksi nontunai menjadikan semua pihak terkait profesional.

Dengan cara itu pula diharapkan program-program di berbagai sektor yang menyentuh langsung masyarakat berjalan lancar dan komprehensif.

Baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, layanan sosial dasar, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pelebagaan Badan Usaha Milik Desa, maupun sistem pendataan di desa-desa.

"Semoga ini memberikan kualitas pengelolaan dan dampak yang luas bagi perkembangan dan kemandirian masyarakat," harapnya.

Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melalui Asisten II Perekonomian

dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman mengatakan, satu di antara upaya peningkatan kualitas keuangan desa adalah dengan pola transaksi nontunai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pola ini diharapkan mampu memberikan dampak, baik dalam peningkatan transaksi dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keuangan.

"Sehingga, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan dan melindungi hak-hak masyarakat dan membangun budaya cashless bagi masyarakat," tegasnya.

Kamaruzaman menjelaskan, sebagai mana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pemanfaatan anggaran desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta percepatan mengejar klafikasi desa mandiri, akan sangat tergantung pada tata kelola desa itu sendiri. **(ina)**



TRIBUN PONTIANAK/SEPTI DWI SABRINA

PERJANJIAN - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan beserta perwakilan desa di Kabupaten Kubu Raya menandatangani perjanjian kerja sama implementasi transaksi nontunai desa dengan Bank Kalbar di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/2).